

Peran Sukiman Wirjosandjojo dalam Partai Syarikat Islam Indonesia Tahun 1927–1933

Hani Nurhasanah¹, Nur'aeni Marta², M. Hasmi Yanuardi³

Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta^{1,2,3}

Email: nurhasanahhani56@gmail.com¹, nuraenimarta@unj.ac.id²,
mhasmiyanuardi@unj.ac.id³

***Abstract:** This study aims to examine the role of Sukiman Wirjosandjojo in the development of the Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) and his contribution to the dynamics of Indonesia's national movement during the transitional period between nationalist ideas and religious-based struggles. The research applies a historical method with a descriptive-narrative approach. The study follows heuristic steps to trace primary and secondary sources, source criticism both internally and externally, interpretation through analysis and synthesis, and systematic historiography writing. The results show that Sukiman Wirjosandjojo played a strategic role as a bridge between secular nationalist groups and Islamic-based parties. He actively strengthened PSII during its period of decline, contributed to the establishment of the national political federation PPPKI, and defended workers' rights through his leadership in the PPPH. Sukiman's moderate and conciliatory stance caused internal friction within PSII, which culminated in his dismissal and suspension, although many considered these measures unfair. This research affirms that Sukiman deserves to be recognized as a Muslim nationalist figure consistently fighting for Indonesian unity and independence.*

Keywords: Sukiman Wirjosandjojo, Partai Syarikat Islam, national movement

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Sukiman Wirjosandjojo dalam perkembangan organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan kontribusinya dalam dinamika pergerakan nasional Indonesia pada masa peralihan antara ide kebangsaan dan perjuangan berbasis agama. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan deskriptif-naratif. Penelitian ini menempuh langkah-langkah heuristik untuk penelusuran sumber primer dan sekunder, kritik sumber secara internal dan eksternal, interpretasi melalui analisis dan sintesis, serta penyusunan historiografi yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sukiman Wirjosandjojo memainkan peran strategis sebagai penghubung antara kelompok nasionalis sekuler dan partai berbasis Islam. Ia aktif memperkuat PSII pada masa kemunduran partai, berperan dalam

pembentukan federasi politik kebangsaan PPPKI, serta membela hak buruh melalui kepemimpinannya di PPPH. Sikap moderat dan konsiliatif Sukiman menimbulkan gesekan internal di PSII, yang berpuncak pada pemecatan dan skorsing dirinya, meskipun banyak pihak menilai langkah tersebut tidak adil. Penelitian ini menegaskan bahwa peran Sukiman layak diangkat sebagai figur nasionalis Muslim yang konsisten memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan Indonesia.

Kata kunci: Sukiman Wirjosandjojo, Partai Syarikat Islam, pergerakan nasional

PENDAHULUAN

Pergerakan nasional merupakan salah satu fase penting dalam sejarah Indonesia yang menandai perubahan pola perjuangan bangsa dari yang bersifat kedaerahan menuju gerakan yang berorientasi nasional. Periode ini umumnya berlangsung pada kurun waktu 1908-1945, dengan tahun 1908 dipandang sebagai titik awal munculnya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan kepentingan bangsa secara lebih luas (Ahmadin, 2017). Sebelum periode tersebut, perlawanan terhadap kekuasaan kolonial cenderung dilakukan secara terpisah dan belum menunjukkan adanya kesatuan visi kebangsaan.

Munculnya pergerakan nasional tidak dapat dilepaskan dari penerapan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Politik etis merupakan kebijakan yang didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah kolonial memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bumiputra. Kebijakan ini, yang mulai diberlakukan sejak tahun 1901, memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama dalam bidang pendidikan. Melalui kebijakan edukasi, pemerintah kolonial mendirikan berbagai lembaga pendidikan yang memungkinkan masyarakat pribumi memperoleh akses pendidikan formal.

Perkembangan pendidikan tersebut melahirkan kelompok terpelajar yang memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran nasional. Kaum terpelajar tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kepekaan terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan kolonial, meskipun bertujuan mendukung administrasi kolonial, secara tidak langsung justru melahirkan kesadaran kritis di kalangan pribumi (Rahman dkk., 2015). Salah satu lembaga pendidikan yang berperan penting adalah Sekolah

Dokter Jawa yang kemudian dikenal sebagai *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA). Para pelajar STOVIA sebagai kelompok terdidik yang hidup di lingkungan perkotaan memiliki kesempatan untuk menyaksikan secara langsung berbagai ketimpangan sosial, sehingga mendorong munculnya kesadaran akan pentingnya perubahan sosial dan politik.

Kesadaran tersebut kemudian diwujudkan melalui pembentukan organisasi modern, yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi tonggak awal pergerakan nasional Indonesia sekaligus menginspirasi lahirnya berbagai organisasi yang lain, seperti *Indische Partij*, Tri Koro Dharmo, Perhimpunan Indonesia, serta Sarekat Islam yang dalam perkembangannya kemudian berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) (Rahman dkk., 2008).

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), yang pada awalnya bernama Sarekat Islam (SI), didirikan di Solo pada 11 November 1912 sebagai perkembangan dari Sarekat Dagang Islam (SDI). Latar belakang pendiriannya berkaitan dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat, khususnya persaingan dalam perdagangan batik dengan pedagang Tionghoa, serta tekanan sosial dari kalangan bangsawan lokal. Dalam konteks tersebut, organisasi ini berfungsi sebagai sarana perlindungan ekonomi sekaligus wadah solidaritas bagi masyarakat pribumi (Noer, 1982). Dalam perkembangannya, PSII menjadi salah satu kekuatan politik yang memiliki pengaruh dalam pergerakan nasional Indonesia, dengan tokoh-tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim sebagai figur sentral.

Dalam kajian historiografi pergerakan nasional Indonesia, pembahasan mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) umumnya lebih menitikberatkan pada dinamika organisasi serta peran tokoh-tokoh utama seperti H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim. Sementara itu, tokoh lain dengan kontribusi penting, seperti Sukiman Wirjosandjojo, cenderung belum banyak dikaji secara mendalam dan sering kali hanya disebut secara sekilas dalam narasi besar pergerakan nasional. Padahal, keterlibatan Sukiman dalam PSII pada periode 1927–1933 menunjukkan peran yang signifikan, terutama dalam upaya memperkuat organisasi, mendorong kerja sama politik, serta menjembatani hubungan antara

kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan Sukiman Wirjosandjojo sebagai fokus utama kajian dalam konteks PSI, khususnya sebagai tokoh perantara dalam dinamika pergerakan nasional Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian mengenai PSII pada masa pergerakan nasional, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai peran tokoh Muslim nasionalis dalam membangun kerja sama politik lintas ideologi pada masa kolonial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan utama mengenai bagaimana peran Sukiman Wirjosandjojo dalam Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada periode 1927–1933. Secara lebih spesifik, penelitian ini mengkaji bagaimana latar belakang yang membentuk orientasi politik Sukiman, bagaimana peran dan kontribusinya dalam dinamika internal PSII, serta bagaimana posisinya sebagai tokoh perantara dalam upaya membangun kerja sama antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam dalam pergerakan nasional Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan penyajian hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-naratif yang lebih banyak menguraikan kejadian-kejadian dalam dimensi ruang dan waktu. Metode sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Abdurrahman, 1999).

Tahap pertama adalah heuristik. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *heurishein*, artinya memperoleh. Heuristik merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data sejarah. Sumber sejarah terdiri dari dua macam, yaitu sumber tertulis (dokumen) dan sumber tidak tertulis (Kuntowijoyo, 2013). Selain itu, kedua sumber tertulis dan tidak tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pada tahap heuristik, penulis mengumpulkan sumber-sumber baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan Sukiman Wirjosandjojo. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa

surat kabar, misalnya surat kabar *Bintang Timoer* dan surat kabar *Oetoesan Indonesia*. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang secara umum atau spesifik berhubungan dengan penelitian. Buku-buku tersebut antara lain membahas sejarah Indonesia pada masa pergerakan nasional dan perkembangan Partai Syarikat Islam Indonesia

Tahap kedua adalah verifikasi atau kritik sejarah, yaitu proses pengujian keabsahan sumber. Tahap verifikasi terdiri atas dua jenis, yaitu autentisitas atau kritik eksternal yang bertujuan menguji keaslian sumber, serta kredibilitas atau kritik internal yang bertujuan menilai tingkat kepercayaan isi sumber. Dalam penelitian ini, penulis melakukan kritik internal dengan mengkaji isi sumber yang telah ditemukan untuk mengetahui relevansinya terhadap penelitian. Melalui tahap ini, penulis berupaya memahami berbagai peran Sukiman Wirjosandjojo selama bergabung dengan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diuji. Pada tahap ini, penulis dituntut untuk bersikap objektif dalam menafsirkan sumber yang diperoleh. Interpretasi terdiri atas dua bentuk, yaitu analisis dan sintesis (Kuntowijoyo, 2013).

Tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Di tahap terakhir ini fakta-fakta yang sudah melewati tahapan di atas akan ditulis secara ilmiah sehingga menjadi sebuah karya tulisan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan diuji (Abdurrahman, 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kehidupan Sukiman Wirjosandjojo

Sukiman lahir pada 19 Juli 1898 di Kampung Beton, Solo. Lokasi kelahirannya berada tidak jauh dari tepian Bengawan Solo (Ibrahim, 1985). Sukiman Wirjosandjojo adalah anak bungsu atau anak terakhir dari empat bersaudara. Ayah Sukiman bernama Wirjosandjojo. Wirjosandjojo memiliki empat

anak yang terdiri dari dua anak perempuan dan dua anak laki-laki. Anak yang pertama adalah seorang perempuan bernama Ny. Kartoyo dan anak kedua juga seorang perempuan bernama Ny. Wiyoso. Lalu anak ketiganya adalah seorang laki-laki bernama Satiman Wirjosandjojo dan anak terakhir adalah Sukiman Wirjosandjojo (Ibrahim, 1985).

Sukiman termasuk orang yang beruntung karena berasal dari keluarga saudagar yang cukup mampu. Oleh sebab itu, ia dapat menempuh pendidikan hingga jenjang tinggi dan memperoleh gelar dokter. Sukiman aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam perkembangan *Jong Java*. Baik dalam forum resmi maupun di tempat terbuka, ia secara konsisten menyampaikan pemikirannya untuk kepentingan anggota *Jong Java*. Ide dan kontribusinya menjadi pendorong utama dalam memupuk semangat menuju persatuan, menjadi sumber inspirasi kesadaran nasional. Pandangan jauh ke depan, kepribadian yang menarik, dan gaya berbicaranya yang meyakinkan memberikan kesan yang kuat. Oleh karena itu, apa yang disampaikannya memiliki makna atau nilai yang sangat berharga bagi anggota *Jong Java*. Lebih dari itu, gagasannya menjadi ikatan yang kuat dalam memperkuat persatuan yang lebih luas, yaitu persatuan bangsa. Sukiman pernah menjabat sebagai ketua perkumpulan *Jong Java* sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1918 sampai 1919 dan pada tahun 1920-1921 (Rahman dkk., 2015). Pada tahun 1922, setelah menyelesaikan studi di STOVIA dan meraih gelar *indische arts* (dokter pribumi), Sukiman, dengan kesiapan fisik dan mental, berangkat ke Belanda pada tahun 1923 untuk melanjutkan studi. Ia memilih melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran di Universitas Amsterdam (Manus dkk., 1993). Gelar yang diperoleh dari fakultas ini setara dengan gelar dokter Barat. Fakultas ini menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai bagi para mahasiswa, memungkinkan mereka untuk berpraktik di rumah sakit Amsterdam dengan mudah. Ketika berada di Belanda, Sukiman Wirjosandjojo tergabung dalam organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) dan pernah menjabat sebagai ketua PI (Manus dkk., 1993).

Peran Sukiman Wirjosandjojo di Partai Syarikat Islam Indonesia

Pada tahun 1927, Sukiman yang telah menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran di Universitas Amsterdam, Belanda, kembali ke Indonesia dan memilih kota Yogyakarta untuk tempat tinggalnya. Sukiman mengabdikan ilmu kedokterannya di Rumah Sakit Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) Muhammadiyah (Hs dkk., 2014). Meskipun berpraktik sebagai dokter, perhatian Sukiman sesungguhnya lebih tertuju kepada pergerakan nasional menuju kemerdekaan bangsa. Dari kota inilah, Sukiman memulai perjalanannya dalam dunia politik dengan tujuan utama mewujudkan kemerdekaan Indonesia, sebagaimana telah ia nyatakan dalam pernyataan politik Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ia sadar bahwa tugas di hadapannya tidak ringan. Sukiman harus menjadi juru bicara yang dinamis dan berkarakter kuat demi menyatukan kembali kekuatan rakyat yang tercerai-berai akibat penjajahan. Sebagai seorang sarjana, ia memahami tanggung jawabnya, dan masyarakat luas menaruh harapan agar ia menjadi motor penggerak dalam melawan dominasi kolonial yang sudah mengakar di Indonesia (Ibrahim, 1985).

Dalam menunaikan tugas tersebut, Sukiman memilih jalur perjuangan politik yang berlandaskan Islam, sesuai keyakinannya. Pilihan ini bukan karena semangat eksklusif atau ingin memecah persatuan, melainkan didasari oleh keyakinan pribadi serta kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat yang menderita akibat penjajahan adalah umat Islam. Pilihan politik Sukiman sering menimbulkan pertanyaan, mengingat ia dikenal sebagai nasionalis dan memiliki latar belakang pendidikan umum. Banyak yang bertanya mengapa ia tidak memperkuat Partai Nasional Indonesia, padahal partai tersebut berada di garda terdepan dalam menggalang persatuan bangsa. Alasannya adalah karena para tokoh pemuda di Perhimpunan Indonesia di Belanda telah sepakat dalam strategi perjuangan, yakni menganjurkan anggotanya untuk memperkuat berbagai partai politik, baik berbasis agama maupun nasionalis. Karena alasan itulah Sukiman memilih bergabung dan memperkuat partai Islam (Ibrahim, 1985). Melalui langkah tersebut, Sukiman memperkuat barisan Partai Syarikat Islam (PSI), yang saat itu mulai mengalami kemunduran. Masuknya Sukiman diharapkan mampu membawa perubahan positif dan menghidupkan kembali perjuangan umat Islam di Indonesia melalui partai

tersebut (Ibrahim, 1985).

Perkembangan *Sarekat Islam* dapat dibagi dalam empat bagian: Periode pertama, dari 1911 sampai 1916 yang memberi corak dan bentuk bagi partai tersebut; kedua, dari 1916 sampai 1921 yang dapat dikatakan merupakan periode puncak; ketiga, dari 1921 sampai 1927, periode konsolidasi. Dalam periode ini partai tersebut bersaing keras dengan golongan Komunis, di samping juga mengalami tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh pemerintah Belanda. Periode keempat, dari 1927 sampai 1942, yang memperlihatkan usaha partai untuk tetap mempertahankan eksistensinya di forum politik Indonesia (Noer, 1982). Sukiman mulai aktif di Partai Syarikat Islam (PSI) pada periode keempat. Pada bulan Agustus 1926 di Bandung atas upaya yang dilakukan oleh *Algemene Studieclub* di bawah kepemimpinan Soekarno, berhasil didirikan *Indonesische Eenheidscomite* (Komite Persatuan Indonesia). Di kota Surabaya, dr. Soetomo turut mengambil inisiatif dengan memprakarsai pembentukan Komite Persatuan Kebangsaan. Tujuan utama dari pendirian kedua komite tersebut adalah untuk membangun kerja sama yang sebaik mungkin di antara kelompok-kelompok pergerakan rakyat. Upaya tersebut menjadi salah satu awal terbentuknya kerja sama antarkelompok pergerakan nasional. Langkah yang diambil oleh kedua tokoh tersebut memperoleh dukungan dari sejumlah organisasi, seperti Partai Syarikat Islam (PSI), *Muhammadiyah*, *Jong Islamieten Bond (JIB)*, *Pasundan*, *Persatuan Minahasa*, *Sarekat Ambon*, dan *Sarekat Madura*. Selanjutnya, pada bulan September 1926, dibentuklah sebuah panitia guna mempersiapkan pembentukan federasi, yang kemudian diikuti dengan pembukaan cabang di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung (Amelz, 1952).

Pada tahun 1927, bersamaan dengan bergabungnya Sukiman menjadi anggota Partai Syarikat Islam (PSI), berdirilah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipelopori oleh Sukarno dan didukung oleh kalangan muda terpelajar, termasuk rekan-rekan Sukiman yang baru kembali dari Belanda. Bersama Sukiman dari PSI, Soekarno mulai merancang pembentukan federasi partai-partai politik sejak bulan April 1927. Pada tanggal 27 April 1927, Sukiman menyelenggarakan sebuah pertemuan di kediamannya di Yogyakarta yang turut dihadiri oleh Tjokroaminoto

dari PSI, Sujudi dari PNI, serta sejumlah wakil dari berbagai organisasi lokal lainnya. Pertemuan ini bertujuan untuk membicarakan persoalan persatuan dalam pergerakan nasional yang tengah berlangsung. Dari diskusi yang terjadi, dihasilkan sebuah keputusan untuk terus menindaklanjuti rencana pembentukan federasi dan mengusulkan agar nama federasi tersebut adalah “Persatuan Rakyat Indonesia” (Ingleson, 1983). Kehadiran PNI menjadi mitra sekaligus pesaing bagi PSI dalam perjuangan melawan penjajahan, dengan tujuan yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Berdirinya PNI juga menjadi tanda adanya perubahan dalam tubuh PSI, karena sejak saat itu PSI harus berkompetisi dengan PNI dalam menarik anggota baru, sehingga PSI tidak lagi bisa merasa sebagai satu-satunya wadah perjuangan umat Islam di Indonesia. Berdirinya PNI justru menimbulkan persaingan terbuka dengan PSI, di mana kedua partai kerap saling menonjolkan kelemahan lawan di hadapan publik untuk menarik dukungan. Persaingan ini sebenarnya hanya menguntungkan pihak kolonial (Ibrahim, 1985).

Usaha Sukiman untuk meyakinkan PSI agar bersedia bergabung dengan organisasi-organisasi nasional lainnya tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif. Penolakan paling keras justru datang dari H. Agus Salim, yang menganggap sebagian nasionalis mendukung kerja sama dengan pemerintah kolonial dalam kondisi tertentu, sementara PSI menentang segala bentuk kerja sama tersebut dan menilai motivasi nasionalis tidak cukup kuat. PSI menilai bahwa nasionalis, khususnya dari kalangan *Studieclub*, hanya menginginkan jabatan dengan gaji besar dari pemerintah kolonial. Sebagai bentuk disiplin organisasi, PSI mengambil langkah tegas dengan meminta anggota *Studieclub* untuk keluar dari PSI, dan melarang anggota PSI tetap menjadi bagian dari *Studieclub* (Ibrahim, 1985). Meskipun menerima berbagai kritik dari H. Agus Salim, hal itu tidak menggoyahkan pandangan Sukiman mengenai pentingnya kerja sama antara PSI dan kelompok nasionalis sekuler (Ingleson, 1983).

Pada Kongres PSI yang berlangsung pada bulan September 1927 di Pekalongan, Soekarno bersama Sukiman kembali membahas kelanjutan gagasan pembentukan federasi dan berusaha untuk merealisasikannya. Karena PNI sudah

memastikan diri untuk ikut serta, fokus utama Soekarno dan Sukiman pada saat itu adalah meraih kerja sama resmi dari PSI. Sebagai perwakilan PNI, Soekarno diundang hadir pada kongres PSI tersebut guna mendiskusikan upaya penyatuan dan kolaborasi antar organisasi-organisasi nasional. Dalam forum kongres, Soekarno dan Sukiman mengumumkan kepada seluruh peserta tentang rancangan Anggaran Dasar organisasi nasional yang mereka ajukan dengan nama *Sarekat Partij-Partij Politiek Indonesia*. Pokok pembahasannya adalah bahwa federasi yang akan dibentuk tidak akan berada di bawah kendali organisasi politik mana pun, akan berjalan secara mandiri, serta hanya akan melakukan aktivitas pada bidang-bidang yang sudah disepakati bersama. Segala keputusan dalam federasi nantinya diambil secara aklamasi (Ingleson, 1983). Soekarno kemudian menjelaskan secara terperinci tiga pasal utama yang terdapat dalam rancangan Anggaran Dasar federasi. Ia menekankan bahwa meski pasal-pasal tersebut diatur, kebebasan tetap dijamin untuk tiap-tiap organisasi anggota dalam melaksanakan kegiatannya, dengan tetap memperhatikan keragaman gerakan nasional yang ada. Setelah pemaparan tersebut, Surjopranoto dan Haji Agus Salim dari PSI memberikan tanggapan terkait usulan anggaran dasar yang telah dipresentasikan Soekarno. Surjopranoto mempertanyakan kepada Soekarno mengenai kriteria organisasi yang dapat menjadi anggota federasi, sebab menurutnya jika organisasi yang prinsipnya kurang kokoh juga diterima, bisa jadi aktivitas federasi akan menjadi sangat terbatas. Menanggapi hal tersebut, Soekarno merujuk pada pasal 5 rancangan Anggaran Dasar yang mengatur bahwa keanggotaan organisasi baru hanya dapat diterima apabila mendapat persetujuan penuh dari anggota federasi yang sudah ada. Sementara itu, Salim berpendapat bahwa hal paling utama dari pembentukan federasi ini adalah mencegah timbulnya konflik pandangan di antara organisasi anggota yang beragam. Pada Kongres PSI tanggal 1 Oktober 1927, PSI secara resmi mengumumkan persetujuannya untuk bergabung sebagai anggota federasi, sehingga memperkuat dukungan kepada Soekarno dan Sukiman untuk segera mengatur proses pembentukan federasi secara formal (Ingleson, 1983).

Pada 17 Desember 1927 di Bandung, didirikanlah Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang bertujuan

untuk:

1. Menyatukan aksi arah kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi, dengan kerja bersama di antara anggota-anggotanya, dan dalam pada itu.
2. Menghindarkan perselisihan sesama anggota-anggotanya yang hanya bisa melemahkan aksi kebangsaan saja (Amelz, 1952).

Sukiman, bersama Sjahboedin Latief, mewakili PSI dalam keanggotaan PPPKI. Partai-partai lain yang turut berpartisipasi dan mengirimkan wakilnya dalam federasi ini antara lain PNI (diwakili Sukarno dan Mr. Iskaq), *Budi Utomo* (Koesoemo Oetoyo dan Soetopo Wonobojo), *Pasundan* (Otto Soebrata, Bakri Soerjatmadja, dan S. Sendjaja), *Serikat Sumatera* (Dahlan Abdullah dan Parada Harahap), *Kaum Betawi* (M. Hoesni Thamrin), *Algemene Studieclub* (Mr. Sartono, Mr. Boediarto, dan Dr. Samsi), serta *Indonesische Studieclub* (Mr. Soejomo, Gondokoesoemo, dan Soendjoto). Belakangan, *Sarekat Madura*, *Tirtajasa*, dan *Perserikatan Celebes* juga ikut bergabung (Amelz, 1952). Perselisihan muncul di antara anggota-anggota PPPKI, khususnya antara PSI dan PNI. Salim dari PSI merasa khawatir jika semangat serta pemikiran yang diusung oleh PNI akan mendominasi federasi dan mempengaruhi partai-partai lain untuk mengikuti sebagian program PNI. Ia pun tidak pernah memberikan perhatian serius pada PPPKI dan kerap menghindari berbagai pertemuan federasi. Dalam rapat para pemimpin PSI pada 18 Januari 1929, Salim menyampaikan pandangannya mengenai persatuan nasionalis, sambil menyoroti bahwa PPPKI beranggotakan organisasi-organisasi yang berbeda sehingga tidak mudah dipercaya dan cenderung memaksakan pandangan masing-masing kepada yang lain (Ingleson, 1983).

Dalam rapat PSI pada bulan Mei, Tjokroaminoto menyampaikan bahwa di antara berbagai organisasi yang berupaya melemahkan PSI, PNI adalah yang paling berbahaya karena mencoba menarik anggota PSI untuk bergabung ke PNI. Pada Februari 1929, PSI juga melontarkan kritik terhadap keputusan PPPKI yang menunjuk Singgih sebagai perwakilan federasi ke Kongres Muhammadiyah, yang

dianggap sebagai lawan utama PSI. Tjokroaminoto mengingatkan bahwa PPPKI seharusnya berfungsi sebagai koordinator partai-partai anggota dan keputusan yang diambil haruslah melalui aklamasi, bukan dikendalikan satu pihak tertentu. Ia menilai bahwa Majelis Pertimbangan telah bertindak melampaui batas dengan mengirimkan perwakilan ke Kongres Muhammadiyah tanpa persetujuan dari seluruh partai anggota (Ingleson, 1983). Ketegangan antara PSI dan PPPKI semakin memuncak setelah rapat tertutup PPPKI pada 26 Desember 1930, ketika M.H. Thamrin menyampaikan protes terkait sikap PSI terhadap federasi pada 1929. Thamrin menyoroti sikap PSI cabang Batavia yang menolak berpartisipasi dalam rapat-rapat protes PPPKI terkait poenale sanctie pada September 1930, bahkan PSI Batavia malah menyelenggarakan rapat umum sendiri pada waktu yang sama. Thamrin meminta agar salah satu wakil PSI, Drijowongso, mengakui kekeliruan tersebut, tetapi Drijowongso tetap berupaya mempertahankan kehormatan partainya. Kritik dari berbagai utusan terhadap PSI pun terus mengalir, hingga Drijowongso memperingatkan bahwa jika serangan tersebut tidak dihentikan, PSI akan mempertimbangkan untuk mundur dari PPPKI (Ingleson, 1983).

Drijowongso bersama Sukiman kemudian melaporkan adanya tekanan terhadap PSI dalam kongres partai di Yogyakarta pada 24-27 Januari 1930, serta mengusulkan agar PSI menarik diri dari PPPKI. Usai kongres, Tjokroaminoto bertemu dengan Sutomo, ketua PPPKI, untuk membicarakan satu pasal dalam Anggaran Dasar PPPKI yang menyatakan bahwa federasi hanya terbuka bagi partai yang anggaran dasarnya menerima bangsa Indonesia saja sebagai anggota. Pasal ini bertentangan dengan prinsip PSI yang membuka keanggotaan untuk seluruh umat Islam, tanpa membedakan kebangsaan. Ketegangan mengenai pasal ini sebenarnya sudah ada sejak pembentukan PPPKI tahun 1927, tetapi sempat dikesampingkan sementara. Jika tidak ditemukan solusi, PSI menyatakan akan keluar dari PPPKI. Sutomo berjanji akan membahas permasalahan ini bersama anggota federasi lainnya, namun perubahan anggaran dasar tidak kunjung disepakati (Ingleson, 1983).

Pada akhirnya, pada tahun 1930, PSI memutuskan untuk mundur dari PPPKI

(Raharjo, 2019). PSI memutuskan untuk keluar dari PPPKI karena Pasal 1 Anggaran Dasar federasi tersebut dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar PSI yang memperbolehkan siapa pun yang beragama Islam, tanpa memandang kebangsaan, untuk menjadi anggota PSI. Sebenarnya, PSI telah melakukan berbagai upaya agar tetap dapat bertahan dalam federasi, namun semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Pada 5 Januari 1931, Muhammad Yusuf dari PNI bersama Singgih dari Budi Utomo mendatangi Sukiman di Yogyakarta. Mereka memohon agar PSI mempertimbangkan kembali keputusannya untuk keluar dari PPPKI, dengan janji akan berusaha mendorong perubahan dalam Anggaran Dasar federasi agar lebih sejalan dengan prinsip PSI. Namun, Sukiman menegaskan bahwa alasan keluarnya PSI dari PPPKI tidak hanya terkait perbedaan prinsip dalam anggaran dasar, tetapi juga karena adanya perlakuan dari Sutomo yang sering kali menyinggung perasaan para pimpinan PSI. Dengan demikian, keputusan PSI untuk mundur dari PPPKI merupakan akumulasi dari persoalan prinsip dan dinamika internal yang belum terselesaikan di antara para pemimpin organisasi (Ingleson, 1983).

Karir politik Sukiman di PSI terus menanjak. PSI melaksanakan Kongres XVII pada 24-27 Januari 1930 di Yogyakarta. Keputusan paling penting dalam kongres ini adalah mengubah nama PSI menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), serta menyusun struktur organisasi partai yang baru. Struktur ini terdiri atas Dewan Partai atau Majelis Tahkim sebagai badan legislatif yang bertugas membuat peraturan, serta *Lajnah Tanfidziyah* yang berfungsi sebagai badan eksekutif pelaksana keputusan partai. Berikut struktur partai yang baru:

1. Organ Legislatif, Dewan Partai, atau Majelis Tahkim PSII di Jakarta dengan H.O.S. Tjokroaminoto sebagai ketua, Haji Agus Salim, R.M. Surjopranoto, dan empat orang lain sebagai anggota.

2. Organ Eksekutif, *Lajnah Tanfidziyah*, di Yogyakarta yang terdiri atas para direktur dari departemen-departemen urusan umum, keuangan, ibadah dan amal saleh, pengajaran dan pendidikan umum, perburuhan dan pertanian, dan

gerakan pemuda. Ketua dari komite eksekutif ini adalah A.M. Sangadji dari Maluku, dan wakil ketuanya adalah Sukiman Wirjosandjojo (dari Jawa). A.M. Sangadji adalah direktur departemen urusan umum, sementara Sukiman adalah direktur keuangan (Djaelani, 2017).

Dengan restrukturisasi kepengurusan PSII, organisasi ini mulai membangun kembali taktik dan strategi perjuangannya untuk melawan penjajahan. Para tokoh PSII, termasuk H.O.S Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim, aktif melakukan propaganda ke berbagai daerah di Jawa, mengadakan rapat di 22 cabang untuk menuntut penghapusan pajak berat, penghapusan kerja paksa, penghapusan pemotongan upah dan gaji, serta tidak memperpanjang hak atas tanah erfah. Semua ini menjadi perhatian besar bagi PSII, terlebih pada masa krisis ekonomi dunia yang menurut pandangan PSII disebabkan oleh sistem kapitalisme dan imperialisme, sehingga menambah penderitaan rakyat. Sebagai solusi, PSII menganjurkan agar masyarakat memanfaatkan produk dalam negeri, mendirikan koperasi pertanian, serta mendesak pemerintah untuk mengurangi pajak dan memperluas lahan pertanian, khususnya tanah konsesi yang masa kontraknya telah berakhir agar tidak diperpanjang. Selain itu, PSII juga menyoroti rencana pemerintah yang hendak memberikan hak atas tanah kepada golongan Peranakan Belanda (Ibrahim, 1985).

Sejalan dengan aktivitas PSII, muncul pula kegelisahan di tubuh Perserikatan Pegawai Pegadaian Hindia (PPPH), yang saat itu masih berada di bawah naungan PSII setelah berpisah dengan PKI. Permasalahan bermula dari konflik internal antara Syamsurizal sebagai ketua dan sekretarisnya, sehingga Syamsurizal mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh Martodiredjo, dengan Drio Wongso sebagai sekretaris. Namun, krisis dalam kepengurusan PPPH tetap berlanjut, terlebih setelah tindakan sepihak pemerintah memecat sekitar 900 pegawai pegadaian. Situasi ini semakin memburuk hingga akhirnya H.O.S. Tjokroaminoto menunjuk Sukiman untuk mengambil alih kepemimpinan PPPH. Penunjukan ini kemudian dikukuhkan secara aklamasi pada Kongres PPPH tahun 1932 di Gondomanan, Yogyakarta, dengan R. Suwito Prawirowiharjo sebagai sekretaris. Sukiman yang dikenal hati-hati namun berpikiran tajam, bersama timnya

mulai membenahi organisasi yang mengalami krisis tersebut (Ibrahim, 1985).

Langkah awal yang diambil Sukiman adalah memperjuangkan nasib pegawai pegadaian yang dipecat secara sepihak oleh pemerintah. Ia menuntut agar keputusan tersebut ditinjau ulang, karena dianggap tidak melalui proses musyawarah yang bijaksana. Berkat perjuangan Sukiman, dibentuklah *Komisi Overleg* yang terdiri dari perwakilan PPPH, dinas pegadaian, dan pemerintah. Komisi ini menemukan bahwa dari 900 pegawai yang dipecat, hanya 30 orang yang dinilai tidak cakap karena mengalami buta warna akibat tuntutan pekerjaan. Akhirnya, pegawai tersebut dikategorikan sebagai *overcomplete van krachten* (kelebihan tenaga), sehingga mereka memperoleh hak untuk menerima tunjangan sebesar 80% dari gaji selama tiga bulan, 60% per bulan selama 21 bulan, dan 40% per bulan selama tiga tahun. Selain itu, mereka juga mendapat prioritas jika ada lowongan pekerjaan. Keberhasilan ini memaksa pemerintah mengeluarkan dana besar sebagai kompensasi, sekaligus mengangkat kembali nama PPPH yang kian disegani (Suratmin, 1978). Demi menyalurkan aspirasi buruh, PPPH kemudian menerbitkan surat kabar *Oetoesan Indonesia*, yang sebelumnya bernama *Mustika* dan diasuh oleh H. Agus Salim. Surat kabar ini diambil alih PPPH di bawah kepemimpinan Sukiman untuk menjadi corong utama perjuangan buruh. Dalam proses membenahi organisasi, Sukiman dan Surjopranoto secara terbuka mengungkapkan adanya penyimpangan keuangan yang melibatkan Martodiredjo. Masalah ini bahkan menyeret nama H.O.S. Tjokroaminoto secara tidak langsung.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Sukiman dan Surjopranoto mengadakan referendum di seluruh cabang PPPH yang berujung pada pemecatan Martodiredjo dari kepengurusan (Noer, 1982). Namun, tindakan ini menuai reaksi dari H.O.S Tjokroaminoto yang merasa tersinggung dan menilai langkah tersebut merugikan reputasinya. Tjokroaminoto meminta agar persoalan diselesaikan terlebih dahulu melalui Kongres PPPH dan pengadilan, namun ia justru membawa permasalahan ini ke Kongres PSII pada Maret 1933 di Jakarta. Dalam kongres tersebut, baik H.O.S. Tjokroaminoto maupun H. Agus Salim menekankan bahwa tindakan Sukiman dan Surjopranoto dianggap bertentangan dengan adab organisasi,

serta semestinya dibawa ke Majelis Taklim sebelum diambil tindakan. Akhirnya, kongres memutuskan untuk memecat Sukiman, Surjopranoto, dan kawan-kawan yang terlibat, serta memerintahkan mereka untuk datang ke Jakarta meminta maaf kepada H.O.S. Tjokroaminoto di hadapan Majelis Taklim dan menulis artikel yang isinya harus disetujui kongres sebelum dimuat di surat kabar *Oetoesan Indonesia* (Noer, 1982). Menanggapi keputusan ini, Sukiman menyatakan kesediaannya datang ke Jakarta asalkan keputusannya ditinjau kembali karena ia menilai keputusan tersebut tidak adil dan diambil sepihak. Akibat pembelaannya, kongres memutuskan untuk memberikan skorsing kepada Sukiman. Keputusan skorsing ini menuai banyak reaksi, dari pers nasional seperti *Bintang Timoer* menyebut keputusan itu “sangat keras, di luar kewajaran, dan tidak adil”, lalu seperti dikutip *Oetoesan Indonesia* menyebut pemecatan terhadap Sukiman dan kawan-kawan sebagai “skandal”. Berbagai cabang PSII di seluruh Indonesia juga meminta pimpinan partai meninjau kembali keputusan tersebut, bahkan mengusulkan agar diadakan referendum untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa Sukiman dan rekan-rekannya (Noer, 1982).

KESIMPULAN

Sukiman Wirjosandjojo merupakan tokoh Muslim nasionalis yang memiliki kontribusi signifikan pada masa transisi perjuangan bangsa. Berbekal latar belakang pendidikan modern dan pengalaman organisasi sejak di *Jong Java* hingga Perhimpunan Indonesia di Belanda, Sukiman tampil sebagai penghubung antara kelompok nasionalis sekuler dan partai-partai Islam. Ia aktif menghidupkan kembali peran PSII yang mulai surut, mendorong pembentukan federasi kebangsaan melalui PPPKI, serta membela kepentingan buruh lewat kepemimpinannya di Perserikatan Pegawai Pegadaian Hindia (PPPH).

Sikap moderat, terbuka, dan konsiliatif yang diperlihatkan Sukiman dalam merangkul berbagai kekuatan politik kadang menimbulkan gesekan internal, terutama ketika menghadapi tokoh-tokoh PSII lain yang bersikap lebih konservatif. Puncak ketegangan itu berujung pada pemecatan dan skorsing dirinya, meskipun

banyak pihak menilai keputusan tersebut tidak adil dan bertentangan dengan semangat persatuan.

Penelitian ini menegaskan bahwa peran Sukiman Wirjosandjojo patut dihargai dalam sejarah nasional, bukan hanya sebagai tokoh politik, tetapi juga sebagai jembatan penting dalam menghubungkan semangat nasionalisme dengan nilai-nilai perjuangan Islam. Dedikasinya menunjukkan bahwa kaum terpelajar bumiputra mampu memainkan peran strategis dalam merumuskan arah perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

Bintang Timoer yang terbit pada 13 Maret 1933

Oetoesan Indonesia yang terbit pada 8 Mei 1933

Buku

Abdurrahman, Dudung. (1999). Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Wacana Ilmu.

Ahmadin. (2017). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Makassar: Rayhan Intermedia.

Amelz. (1952). H.O.S. Tjokroaminoto Hidup dan Perdjuangannya. Jakarta: Bulan Bintang.

Djaelani, Anton Timur. (2017). Gerakan Sarekat Islam Kontribusinya pada Nasionalisme Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Hs, Lasa, Widyastuti, Imron Nasri, Iwan Setiawan, Amir Nashiruddin, dan Arief Budiman. (2014). 100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat

Muhammadiyah.

Ibrahim, Muchtaruddin. (1985). dr. Sukiman Wirjosandjojo: Hasil Karya dan Pengabdianya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Ingleson, John. (1983). Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927–1934. Jakarta: LP3ES.

Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Manus, M P B, Zulfikar Ghazali, Susanto Zuhdi, Sumardi, Wiwi Kuswiah, Suryo P Haryono, Triana Wulandari, dan Julinar Said. (1993). Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Noer, Deliar. (1982). Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES.

Raharjo, Handri. (2019). Metamorfosis Sarekat Islam. Yogyakarta: Media Pressindo.

Rahman, Momon Abdul, Suswadi, Misman, Kurniasih, dan Ali Mustofa. (2015). Jong Java Peranannya dalam Persatuan Bangsa. Jakarta: Museum Sumpah Pemuda.

Suratmin. (1978). Pahlawan Nasional Raden Mas Suryopranoto. Jakarta: Proyek BPN.